

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM
MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus tahun 2014-2016)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan
pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Oleh
AHMAD NUR SYAMSIR
NIM. 10100113073

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AHMAD NUR SYAMSIR
Nim : 10100113073
Tempat /Tgl. Lahir : Makassar, 04 Oktober 1994
Jurusan : Peradilan Agama
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar (studi kasus tahun 2014-2016)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “*Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar (studi kasus tahun 2014-2016)*” adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan (tanpa campur tangan penyusun), maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, 17 November 2017

Penyusun

AHMAD NUR SYAMSIR

Nim: 10100113073

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi Kasus 2014-2016)" yang disusun oleh Ahmad Nur Syamsir, NIM: 10100113073, mahasiswa prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 07 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1439 H. dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 19 Desember 2017 M.
30 Rabiul Awal 1439 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag	(.....)
Munaqisy I	: Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muh. Sabri AR, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Rahma Amir, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Drs. H. Syamsuddin Ranja M.H.I.	(.....)

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 196210161990031003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah- Nya, Berkat Ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Baginda Besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, yang telah mendidik umatnya dengan tarbiyah tentang keimanan, kesabaran, keramah-tamahan, ilmu pengetahuan serta akhlaqul karimah, dan kita sebagai umatnya yang terus istiqomah mengikuti ajaran dan sunahnya dalam setiap sendi kehidupan.

Alhamdulillah, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar strata 1 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Dengan kesadaran hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, mengingat terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun demikian, Penulis sudah berusaha keras dengan kemampuan tersebut dan berbagai macam upaya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan semaksimal mungkin. Tidak dapat dikatakan hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui dalam penulisan skripsi ini. Skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan orang-orang disekitar Penulis, dengan penuh cinta dan setiap butiran doanya yang selalu memberikan masukan, nasehat, bimbingan bahkan

dorongan dan semangat sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan lancar.

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada bapak/ ibu, terutama:

1. Ibunda **NURPIAH** dan Ayahanda **ADB. RAHIM** tercinta , yang selalu memberikan doa tulusnya kepada penulis, semoga ini semua menjadi tanda bakti ku kepadamu dan penulis tahu, tidak ada yang dapat membalas jasa ibunda melainkan kepuasanmu dalam mendidik penulis hingga berhasil.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.Si.** selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak **Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya
4. Bapak **Dr. H. Supardin M.Hi.** selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama beserta ibu **Dr. Hj. Patimah, M.Ag.** selaku Sekertaris Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak **Dr. Rahma Amir, M,Ag.** selaku pembimbing I dan Bapak **Drs. Symsuddin Ranja, M.H.I.** selaku pembimbing II. Kedua Beliau ini, di tengah kesibuka dan aktivitasnya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini,

6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
7. Semua instansi terkait responden yang telah bersedia membantu dan memberikan data kepada penulis, baik dari pihak Kantor Badan Amil Zakat Kota Makassar, yang telah memberikan masukan dan saran selama penyusunan skripsi ini
8. Seluruh Sahabat-Sahabati **PMII KOMISARIAT UIN Alauddin Makassar Cabang Makassar** tanpa terkecuali.
9. Seluruh teman kuliah Jurusan Peradilan Agama Angkatan 2013 Khususnya **Reski Amelia S.H, Muh Nur Ardiansyah, Rizal, Wahyudi Sahri, Muh. Faiz, Muh. Anhar, Muh. Ikho Hasmunir, Muh. Idham Dzulhaj, Sitti Wulandari, Muh. Sahrul**, terlebih buat saudara seperjuangan teman-teman kelas **Peradilan Agama (B)** tanpa terkecuali, dan terima kasih juga kepada **Nurahayati Ahmad**, yang selama ini ikut membantu dan menyemangati dan memotivasi saya. Terima kasih atas kesetiakawanan, dukungan dan motivasinya selama ini.
10. Seluruh teman KKN UIN Alauddin Makassar Angkatan 55 Khususnya posko 7 Kelurahan Jene'Batu, **Muh. Syahrul, Ince Nasri, Hadi Kumala, Dedi Ilham, Elatul Fajrah, Hirmawati, Nurhidayah, Ummu Kalsum, Hasmi**. Atas segala bantuan, kerjasama, uluran tangan, yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini. Begitu banyak

bantuan yang telah diberikan bagi penulis , namun melalui doa dan harapan penulis, semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal denganya dari Allah swt.

Akhirnya dengan penuh rendah hati penulis mengharap tegur manakala terdapat kekeliruan menuju kebenaran dengan mendahulukan ucapan terima kasih yang tak terhingga.

Makassar , 30 oktober 2017

Penulis

AHMAD NUR SYAMSIR



DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENEGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN LITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Pengertian Zakat.....	10
B. Dasar Hukum Zakat.....	11
C. Kedudukan Zakat Dalam Islam.....	15
D. Macam-macam Zakat dan Tujuannya.....	18

E. Harta Yang Wajib di Zakatkan.....	22
--------------------------------------	----

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	32
B. Metode-metode Penelitian (Pendekatan Penelitian, Sumber data, Metode Penelitian, Instrument Penelitian, Tehnik Pengolahan dan Analisis Data, Pengujian Keabsahan Data).....	33

BAB IV OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS TAHUN 2014-2016)

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
1. Profil Baznas Kota Makassar.....	41
2. Strategi Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar Dalam Memaksimalkan Pengelolaan Potensi Zakat.....	43
B. Efektifitas pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar.....	45
C. Strategi Baznas Kota Makassar Dalam Memaksimalkan Pengelolaan Potensi Zakat di Kota Makassar.....	46
D. Efektifitas pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Makassar.....	51

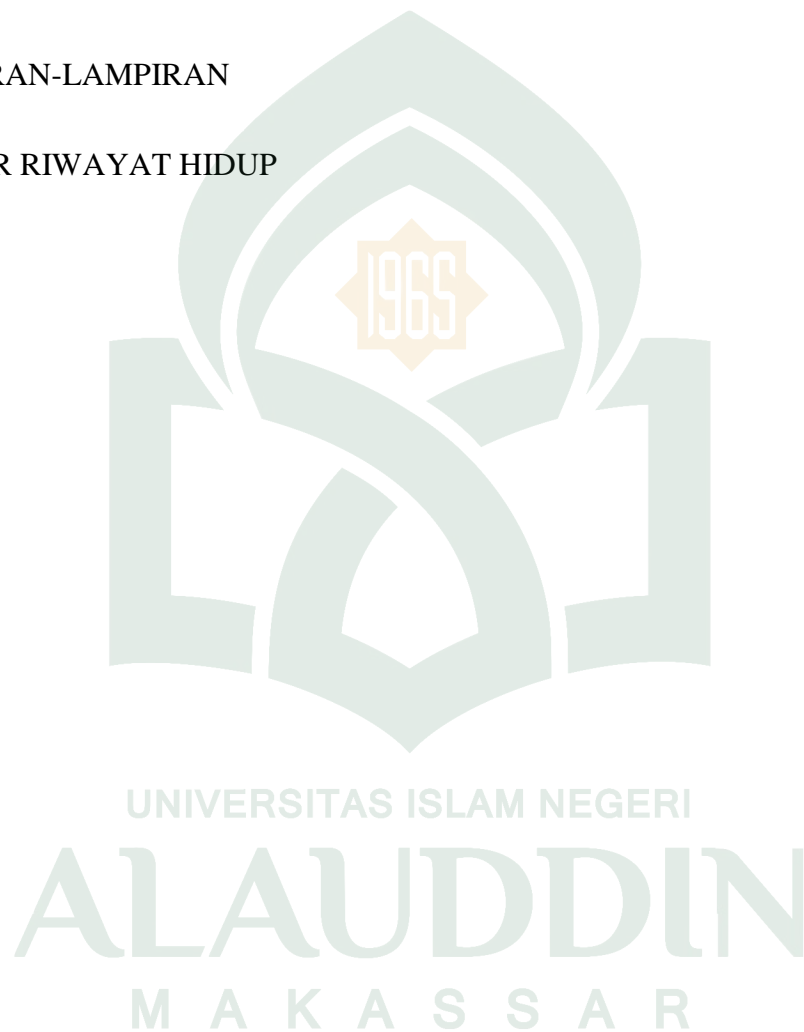
BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Implikasi Penelitian.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



PEDOMAN LITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Za	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrop terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostop
ي	ya	y	ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ().

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	a	a
	<i>Kasrah</i>	i	i
	<i>Dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah dan ya	ai	a dan i
	fathah dan wau	au	a dan u

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathah dan alif atau ya</i>	a	a dan garis di atas
	<i>kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di atas
	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf *ﺹ* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah*(i).

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ﻻ* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah

Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

8. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz a-ljalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).



ABSTRAK

Nama : Ahmad Nur Syamsir
Nim : 10100113073
Jurusan : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
**Judul : Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam
Megentaskan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi
Kasus Tahun 2014-2016)**

Dalam Penelitian dibahas tentang Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, juga berdasarkan pasal (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial maka muncul pertanyaan ini : 1). Bagaimana Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat di kota Makassar?, dan 2). Bagaimana efektifitas pendistribusian zakat di badan amil zakat nasional Kota Makassar dalam membantu mengentaskan kemiskinan di Kota Makassar?.

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Field Research deskriptif kualitatif adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif dengan mengelola data primer yang bersumber dari kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Strategi BAZNAS dalam memaksimalkan pengelolaan Zakat yakni Strategi dalam publikasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Makassar, strategi administrasi pengelolaan zakat BAZNAS kota Makassar, strategi aksi dari pengelolaan zakat. 2. Efektifitas pendistribusian zakat di Kota Makassar dapat dipengaruhi dalam tiga faktor penting yakni Potensi zakat yang dimiliki oleh masyarakat, jumlah potensi dana zakat yang terserap oleh BAZNAS kota Makassar dan keberhasilan dari distribusi, namun ketidakberhasilan dalam pengumpulan zakat, dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat.

Implikasi penelitian Secara ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan keilmuan khususnya mengenai pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kota Makassar. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak utamanya bagi para mahasiswa dan kalangan masyarakat ilmiah hingga dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka membangun dan mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Makassar.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu aspek penting dalam ajaran Islam. Sebab zakat merupakan kewajiban keagamaan dan harta sekaligus. Dalam menggambarkan urgensi (kedudukan) zakat ini, Al-Qur'an menyebutnya sebanyak 72 kali dengan berbagai macam derivasinya.¹ Zakat merupakan kewajiban agama yang harus dibayarkan oleh setiap orang muslim di dalam masyarakat yang telah memenuhi persyaratan tertentu (nisab), dan harus dibayarkan dalam keadaan apapun. Dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk membantu anggota masyarakat yang kurang beruntung. Dengan demikian, zakat membentuk masyarakat untuk bekerja sama, bertindak sebagai lembaga penjamin (asuransi), dan penyedia dana cadangan bagi masyarakat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia dengan memperhatikan dan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu. Zakat merupakan instrument ekonomi yang diperuntukkan sebagai pengurang kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Secara khusus zakat dalam pendistribusiannya diutamakan kepada orang yang serba kekurangan di dalam harta

¹Dr. Zainuddin, S.Ag., SH.,MH. *Hukum Zakat Perspektif Normatif, Kesejahteraan dan Keadilan Sosial*

Dari perspektif sosial kemasyarakatan dan ekonomi, zakat akan menjadi sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Proses peningkatan pendapatan masyarakat inilah memungkinkan dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat terjadi karena zakat mengakomodir golongan masyarakat yang lemah untuk memenuhi kebutuhannya, akibatnya pelaku dan volume pasar dari sisi permintaan menjadi meningkat. Dengan perkataan lain, distribusi zakat terhadap masyarakat yang layak menerima zakat dari segi ekonomi akan memperoleh pendapatan sekaligus kesempatan untuk berusaha serta memiliki daya beli bahkan daya jual yang akhirnya memiliki pula akses pada perekonomian.²

Dengan sistem dan mekanisme zakat yang terlembagakan setidaknya menjadikan aktivitas ekonomi dalam kondisi terburuk sekali pun dapat dipastikan akan berjalan pada tingkat yang minimal untuk memenuhi kebutuhan primer. Zakat juga memungkinkan perekonomian tetap berjalan pada tingkat yang minimum, disebabkan karena kebutuhan konsumsi minimum dijamin oleh dana zakat.

² Sohrab, *Zakat dan kebijakan fiskal meretas akar-akar kemiskinan* (Cet: I Makassar: Alauddin University press, 2012), h.5

Keadilan ekonomi dalam Islam mengimplikasikan agar potensi-potensi ekonomi termasuk zakat dioptimalisasikan sejauh mungkin di setiap waktu dan zaman. Allah menciptakan segala sesuatu untuk kemakmuran manusia, maka manusia dituntut agar secara terus menerus mengikhtiarkan perbaikan ekonomi. Jika kebutuhan-kebutuhan ekonomi seseorang telah terpenuhi, maka personalitasnya niscaya akan semakin kreatif, intelektual sebab manusia merupakan mesin berfikir yang bahan bakarnya fisiknya adalah faktor ekonomi. Sistem ekonomi Islam mesti berupaya mewujudkan keadilan ekonomi dan menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan terciptanya kerjasama di bidang ekonomi baik secara individu-individu juga secara kelembagaan dengan menolak pemilihan kehidupan menjadi sekuler dan sacral. Islam menundukkan seluruh upaya dan aktivitas manusia di bawah pengawasan secara ketat maupun rasional bahkan spiritual. Dari perspektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipatgandakan harta masyarakat. Proses pelipatgandaan ini dimungkinkan karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran juga untuk diusahakan dan dialirkan sebagai investasi sector riil yang pada akhirnya zakat berperan besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat.³

³Dra. Sohrah, M. Ag, *Zakat dan Kebijakan Fiskal Meretas Akar-Akar Kemiskinan*, h. 106-

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa, masyarakat di kota Makassar yang pada umumnya beragama Islam, dan karenanya dapat di pahami apabila ada keinginan untuk melibatkan diri dalam pembangunan hukum. Zakat di samping membina hubungan Allah juga sebagai jembatan hubungan kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan solidaritas bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu, tolong menolong dan yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin sehingga zakat di katakan ibadah sosial.

Dalam segala dimensi ruang dan waktu, manusia selalu dihadapkan pada kenyataan adanya umat kaya dan umat miskin, baik dahulu maupun sekarang. Baik di negara berkembang maupun negara terbelakang, itulah ketentuan Allah swt.

Sensitifitas hubungan si kaya dan si miskin kadang melahirkan kesenjangan sosial, yang dipandang sebagai ketidak adilan. Maka Islamlah pendamai antara umat kaya dan umat miskin tersebut. Ini antara lain karena ajaran Islam menempatkan harta sebagai amanah (titipan) Allah swt. yang harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemberi amanah tersebut.⁴

⁴Zakiyah Daradjal, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa* (Cet. II, Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Ruhama, 1992), h. 7.

Karena zakat berhubungan dengan masyarakat, maka pengelolaan zakat, juga membutuhkan konsep-konsep manajemen agar supaya pengelolaan zakat itu bisa efektif dan tepat sasaran.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 tentang tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional.⁵

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 dalam pasal 1 ayat 2 bahwa BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan, Selanjutnya zakat tersebut dapat disalurkan kepada yang berhak menerimanya, khususnya untuk fakir miskin. Pendistribusian zakat tersebut dapat menjadi sarana sosial dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Apabila zakat tersebut dikelola dengan baik, maka akan membawa manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat miskin. Keberhasilan masyarakat Islam dalam menarik zakat, dampak positifnya sangat besar dalam memerangi kemiskinan dan kesusahan. Sehingga terciptalah masyarakat Islam sebagai suatu masyarakat yang saling mencukupi dan saling membantu.⁶

⁵<http://pusat.baznas.go.id/> diakses pada tanggal 12 Oktober 2017 pukul 19.17

⁶Abdullah Nasir Ulwa, *Hukum Zakat dari Pandangan Empat Mazhab*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin (Jakarta: Citra antar Nusa, 1985), h. 10

B.Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya mengenai optimalisasi pengelolaan dana zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Makassar.

2. Deskripsi Fokus

Penelitian ini menjelaskan tentang optimalisasi dana zakat dalam mengentaskan kemiskinan di kota Makassar, dimana penulis memandang perlu untuk memberikan pengertian dari beberapa istilah sebagai kerangka acuan dalam melakukan uraian secara komprehensif terhadap persoalan yang menjadi objek kajian. Diantara kata-kata yang dianggap penting oleh penulis untuk diberikan batasan secara sederhana adalah kata Optimalisasi, Dana, Zakat, Mengentaskan, Kemiskinan.

Optimalisasi: adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya).

Dana Zakat: adalah sejumlah uang atau harta yang wajib dikeluarkan oleh pemeluk agama Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah.

Mengentaskan: memperbaiki (menjadikan, mengangkat) nasib atau keadaan yang kurang baik kepada yang (lebih) baik.

Kemiskinan: adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.⁷

Berdasarkan definisi variabel judul yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan pengertian yang bersifat operasional dengan judul “Optimalisasi Dana Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka terdapat beberapa sub masalah, masalahnya yaitu:

1. Bagaimana Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar dalam Memaksimalkan Pengelolaan Potensi Zakat di Kota Makassar ?
2. Bagaimana Efektivitas Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar dalam Membantu Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar ?

⁷<http://KBBI.go.id/> diakses pada tanggal 02 Agustus 2017 pukul 20.30

D. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai zakat, telah banyak diungkap oleh para cendekiawan dan fuqaha. Dalam hal ini, beberapa literatur yang penulis temukan antara lain:

1. Prof. Dr. M. Quraish Shihab dalam *Membedakan Al-Qur'an* mengemukakan bahwa minimal ada tiga hal yang menjadi landasan filosofi dari diwajibkannya zakat, yaitu *istikhlaf* (penugasan sebagai khalifah dimuka bumi), sosial dan persaudaraan. Quraish juga mengemukakan bahwa dampak zakat adalah megikis habis sifat-sifat kikir dalam jiwa seseorang serta melatihnya memiliki sifat-sifat dermawan dan mengantarnya mensyukuri nikmat Allah, sehingga pada akhirnya ia dapat menyucikan diri dan mengembangkan kepribadiannya. Dampak lainnya adalah menciptakan ketenangan dan ketentraman serta untuk mengembangkan harta benda.⁸Dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim karena dengan membayar zakat dapat membersihkan kadar harta yang kita miliki serta menumbuhkan solidaritas sosial dan persaudaraan.
2. H. Masyfuk Zuhdi dalam bukunya *Masa'il Fiqhiyah* mengatakan bahwa semua macam penghasilan terkena wajib zakat, asal penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidup dan keluarganya. Ia menyandarkan

⁸M. Quraish shihab, *Membedakan Al-Qura'an* (Cet,XI; Bandung: Mizan 1995), h. 323-325.

pendapatnya tersebut pada firman Allah swt QS, Al-Baqarah/2: 267. Pada ayat tersebut diartikan dengan pengertian yang umum yakni *apa saja*.⁹

3. Yusuf al-Qardhawi dalam *Fiqh al-Zakat* menjelaskan bahwa di samping zakat profesi juga ada zakat penghasilan yang perlu dikeluarkan. Beliau mengutip pendapat ulama fiqih dan interpretasi ulama kontemporer.¹⁰ Disamping karya-karya yang disebutkan, yang membahas tentang zakat, menurut pengamatan penulis bahwa belum dijumpai karya ilmiah yang membahas secara langsung tentang pengelolaan dana zakat secara detail. Skripsi ini akan memperdalam permasalahan zakat menyangkut pengelolaan dana zakat.

E. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Penyusunan skripsi ini oleh penulis dimaksudkan untuk tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Di Kota Makassar
2. Untuk mengetahui Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat dapat mengentaskan kemiskinan di Kota Makassar.

Sedangkan kegunaannya meliputi :

1. Untuk kegunaan praktis yang diharapkan dapat berguna bagi para umat Islam tentang pengelolaan zakat menurut agama Islam.

⁹Masyfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam* (Cet. III; CV. Haji Masagung, 1992), h.215

¹⁰Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakat*, h.460

2. Sebagai bahan informasi kepada kita semua bahwa Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat dapat mengentaskan kemiskinan Di Kota Makassar



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

1. Pengertian Zakat

Perkataan zakat berasal dari kata *zaka*, artinya berkah, tumbuh, bersih, dan baik.¹ Artinya zakat menurut istilah fiqih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Selain dari itu, arti tumbuh dan bersih tidak dipakai hanya buat kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa orang menunaikan zakat.

Sejalan dengan arti zakat di atas, menurut M. Moh. Ali, mengatakan bahwa zakat itu di ambil dari perkataan zakat berasal dari kata *zaka*, artinya tumbuh dan subur. Makna lain dari zakat, sebagai iman digunakan dalam Al-quran adalah suci dari dosa.²

Dari pengertian tersebut di atas, disimpulkan bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah swt, sebagai sedekah wajib, dan mereka telah menetapkan kelompok-kelompok tertentu dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

¹M. yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Study Komparatif Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, Di Terjemahan Oleh Salman Harun, (Jakarta : Litera Antar Nusa. H.34. dengan Mengutip *Mu'jam Wasit* dikutip oleh K.N Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (cet I ; Surabaya : Al-Ikhlash, 1995), h.21

²H. Mohammad Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Edisi I (cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995), h.241

2. Dasar Hukum Zakat

Mengeluarkan zakat wajib hukumnya bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Untuk menjelaskan tentang dasar hukum zakat, penulis membagi dua dasar hukumnya yaitu al-Quran dan hadist Nabi saw. Dalam Al-Qur'an terdapat tiga puluh dua kata zakat dan delapan puluh dua kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu *shadaqah* dan *infaq*. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting dalam islam. Dari 32 ayat dalam Al-Qur'an yang memuat ketentuan zakat tersebut, 29 ayat diantaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan shalat, menurut John B. Taylor dalam tesisnya yang berjudul *The Qur'anic Doctrine of shalat* (1964) rangkaian kata shalat-zakat dalam Al-Qur'an sering kali ditemukan secara konsisten.³

Hal ini menunjukkan bahwa eratnya kaitan antara shalat dengan zakat sekaligus menunjukkan bahwa Islam sangat memerhatikan hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan antar manusia. Nash Al-Qur'an tentang zakat diturunkan dalam dua periode, yaitu periode Makkah sebanyak delapan ayat dan periode Madinah sebanyak dua puluh empat ayat. Perintah zakat yang diturunkan pada periode Makkah, sebagaimana terdapat dalam kedua ayat tersebut diatas, baru merupakan anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang-orang

³Nuruddin Mhd Ali. *Zakat sebagai instrument Kebijakan Fiscal*. h. 24

Yang Berhak Menerima Zakat

Yang berhak menerima zakat berdasarkan QS At-Taubah/9: 60 yaitu sebagai berikut:

بِوَفَى قُلُوبُهُمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهِمَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
يُمْعِلُهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ مُبِينٌ. فَرِيضَةُ السَّبِيلِ وَأَبْنَاءُ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي الْغَرَمِينَ الرِّقَا
حَك

Terjemahannya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

1. Fakir

Fakir adalah seorang muslim yang memiliki kemampuan untuk menghidupi dirinya, akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya, jadi mereka mungkin saja memiliki pekerjaan atau usaha, akan tetapi hasil dari pekerjaan dan usaha tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya.

2. Orang Miskin

Orang miskin adalah seorang muslim yang tidak memiliki harta dan pendapatan dalam bentuk apapun. Tentu saja ada banyak hal yang menyebabkan mereka dalam kondisi ini. Bisa saja karena bencana yang

menimpa mereka atau karena cacat yang mengakibatkan mereka tidak bisa bekerja atau orang-orang yang memiliki harta akan tetapi tidak dapat menggunakannya karena alasan tertentu.

3. Amil zakat

Amil zakat juga berhak menerima bagian dari zakat yang terkumpul. Amil zakat adalah seorang muslim yang bebas, adil, dan jujur, ia juga harus benar-benar memiliki pengetahuan syariat yang berhubungan dengan penghitungan dan penarikan zakat. Mereka tetap berhak menerima bagian dari zakat walaupun mereka memiliki sumber pendapatan lain karena apa yang mereka terima dari bagian zakat adalah pembayaran dari apa yang mereka lakukan

4. Muallaf

Yang diutamakan disini adalah orang-orang yang baru saja menjadi muslim (*muallaf*) atau orang-orang yang akan menjadi muslim, agar mereka mendapatkan keteguhan hati serta mendapatkan pertolongan dari bagian zakat yang mereka terima.

5. Memerdekakan Budak

Zakat dapat dipergunakan untuk membantu budak muslim yang hendak memerdekakan dirinya. Seorang budak yang dibebaskan dengan cara ini harus tetap tinggal dalam komunitas masyarakat muslim.

6. Orang-orang yang berhutang

Zakat dapat diberikan kepada seorang muslim guna membayar hutangnya, kondisi ini juga berlaku bagi orang yang berhutang namun

meninggal dunia. Zakat dapat diberikan kepada orang yang berhutang jika mereka telah memberikan semua harta yang dimilikinya kepada orang yang dihutangi.

7. Fisabillah

Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah mereka yang sedang berada dalam kondisi berjihad di jalan Allah, sehingga pemberian ini dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan mereka secara baik. Zakat dapat diberikan juga kepada mereka, walaupun mereka berada di tempat yang jauh. Walaupun begitu, bagian zakat yang diberikan kepada mereka tidak boleh dipergunakan untuk membangun atau memelihara benteng atau sarana pertahanan lainnya.

8. Ibn Sabil

Zakat juga dapat digunakan untuk membantu muslim yang sedang bepergian, mereka haruslah orang yang merdeka dan benar-benar membutuhkan bantuan. Pemberian zakat didasari oleh keadaan musafir tidak dapat menemukan orang yang dapat memberikan bantuan yang mereka butuhkan.⁴

⁴Abdalhaqq bewley, Amal Abdalhakim Douglas. *Zakat raising A Fallen Pilar (Restorasi zakat menegakkan pilar yang runtuh)*, terj. Abdarrahman rachadi, Abbas firman, zaenab (Cet. I; Jakarta: Pustaka Adina, 2005) h. 37-40

B. Kedudukan Zakat Dalam Islam

Al-quran dan Hadis selalu mengaitkan antara shalat dengan zakat. Hal ini menunjukkan bahwa antara zakat dan shalat mempunyai kaitan yang sangat erat. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut. Shalat merupakan tiang agama sedangkan zakat merupakan titian dalam Islam, setiap orang melewatinya akan selamat sampai tujuan dan siapa yang memilih jalan lain dia akan tersesat.

Al-quran juga menjadikan tidak penunaian zakat sebagai salah satu karakter orang beriman dan bertaqwa. Sebaliknya, ia menjamin siapa enggang membayarnya sebagai salah satu ciri orang munafik. Zakat salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut peraturan tertentu.⁵

Untuk mempertimbangkan orang-orang yang berhak menerima zakat, cukup dengan melihat kepada kondisi kehidupan ekonominya. Zakat dapat diberikan langsung kepada orang yang berhak menerimanya. Di samping itu bisa pula diserahkan kepada badan atau lembaga pengurusnya, yang kemudian meneruskannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam hal ini badan atau lembaga tersebut dapat memberikannya kepada lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang peningkatan mutu pendidikan muslim maupun kepada tenaga-tenaga riset dan organisasi-organisasi tertentu, untuk bertujuan yang bermanfaat.

⁵Muhammad Daud Ali, *Sistim Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (cet. IX; Jakarta: UI Press, 1998), h.9

Orang-orang yang tidak berdaya dan benar-benar miskin adalah lebih berhak menerima zakat dari pada orang-orang yang mampu berusaha meski dengan usahanya itu belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sebab itu pembagian zakat itu hendaklah dengan cara yang bijaksana sehingga tercapai apa yang dituju oleh ajaran Islam yang sebenarnya dalam masalah zakat tersebut. Zakat merupakan suatu kewajiban khusus dalam agama Islam yang harus dibayarkan, di samping bertujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Islam.

Zakat juga bukan hanya suatu kewajiban biasa melainkan salah satu dari lima pilar bangunan Islam, keabsahannya sebagai salah satu tiang Islam tidak diragukan lagi.⁶ Agama memiliki berbagai kelebihan yang membuktikan bahwa ia benar-benar berasal dari sisi Allah swt. dan merupakan risalah *Rabbaniyah* terakhir yang abadi di antaranya adalah kemampuannya mendahului zaman, lalu dengan penuh antusias berusaha menyelesaikan masalah kemiskinan dan mengayomi kaum miskin.

Perhatian Islam terhadap kaum miskin tidak bersifat sesaat tetapi prinsipil sehingga tidak mengherankan kalau zakat yang di syariatkan Allah swt. sebagai penjamin hak fakir miskin. Dalam harta umat dan negara merupakan pilar pertama Islam, dalam kitab suci Al-quran dengan tegas menyatakan bahwa barang siapa yang ingin memasuki persaudaraan Islam harus menegakkan shalat dan membayar

⁶Yusuf Qardhawi, *Musykilah Al-Faqrwakaifa Al-Ajaha Al-Islam*, Diterjemahkan oleh syafiril Halim dengan Judul *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Cet.I; Jakarta : Gema Insani Press, 1995), h.98.

zakat secara teratur. kedua tindakan tersebut secara fundamental sama pentingnya. zakat kehilangan maknanya bila tidak timbul dari hati yang taqwa dan perasaan yang bersih tanpa mementingkan diri sendiri. shahadat tidak berarti jika tidak menyebabkan perasaan dan sikap yang tulus untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang murni. adanya pengaruh timbal balik yang dinamis antara dua lembaga spiritual dan duniawi dalam masyarakat Islam ini adalah berimbang terdapatnya kesatuan batin agama dan ilmu ekonomi.

Hal ini menurut Muhammad Abdul Mannan yang mengutip pendapat R. Marret dengan tepat menyatakan bahwa: kemajuan yang sebenarnya adalah di dalam kedermawanan. Sedangkan kemajuan lainnya adalah nomor dua. Kemajuan teknologi memang cepat tapi tanpa kemajuan dalam amal kedermawanan, maka kemajuan teknologi tidak berguna. Bahkan dapat lebih buruk dari pada tidak berguna kemajuan teknologi hanya memberikan sarana yang lebih efisien untuk menarik kata-kata kita oleh karena itu pentingnya zakat tidak diragukan lagi.⁷

Dengan demikian, kedudukan zakat dalam Islam sangat penting dalam rangka menjadikan harta benda orang lain yang dengan sengaja mampu tidak sengaja telah masuk ke dalam harta benda kita. Di pandang dalam segi pengertiannya zakat berarti kebersihan dan pertumbuhan.

⁷Moh. Abdul Mannan, *Islamic Economic Theory and Practice*, Diterjemahkan oleh M. Nastangin dengan Judul *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek* (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1993), h.257.

Al-quran menjadikan pembayaran zakat, disamping bertaubat dari perbuatan syirik dan menderikan shalat juga zakat sebagai syarat seorang masuk Islam, menerima peralakuan sebagai ikhwan dan menjadi anggota masyarakat.

C. Macam-Macam Zakat dan Tujuannya

1. Macam-macam zakat

Secara umum zakat dibagi 2 (dua) bahagian yaitu :

- a. Zakat maal (Zakat harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.⁸
- b. Zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafka keluarga yang wajar pada malam hari raya idul fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa.⁹

Zakat terbagi dua jenis. *Pertama*, zakat yang ditentukan oleh *syari'at* agama. *Kedua*, zakat menurut pandangan ahli *thariqah* atau zakat hakikat. Zakat yang ditentukan oleh *syari'at* ialah zakat yang dikeluarkan untuk harta kekayaan yang di peroleh secara halal di dunia, yang berasal dari kelebihan harta dalam keluarga, dan dibagikan kepada mereka yang memerlukan dan *ashnaf-ashnaf* zakat. dan berhak menerimanya adalah para fakir miskin dan orang terlantar lainnya.

⁸ Muhammad Daud Ali, op. Cit., h.42

⁹ Lihat, *ibid.*, h.247

zakat dari sudut pandang *tahriqah* ialah seorang dari “harta rohani” yang diperoleh seseorang dan dibagikan kepada mereka yang memerlukan, yakni fakir miskin dalam bidang rohani. zakat jenis ini akan melahirkan perwatakan untuk selalu memberikan sebagian dari semua hasilnya untuk selalu diberikan orang lain, menolong mereka yang kelaparan, memberdayakan mereka yang menderita kemiskinan.¹⁰

Dari kedua pengertian zakat tersebut di atas secara umum berhubungan dengan harta kekayaan. Di samping itu ada zakat yang diberikan individu perkepala bukan kepada harta, yang dikenal dengan nama zakat fitra. Zakat ini sangat di syariatkan oleh Islam bertepatan dengan penyempurnaan bulan suci ramadhan serta menyongson hari idul fitri. Siapa yang membayar zakat sebelum shalat idul fitri, maka itu merupakan zakat yang di terima, dan siapa yang membayar selesai shalat, maka itu menjadi sedekah di antaranya bermacam-macam sedekah.

Jadi zakat fitra itu wajib atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki kelebihan makanan selama dalam jangka waktu satu hari satu malam sebanyak satu sha dari makanan bersama keluarganya, istri, anak-anaknya maupun yang mengurus urusan rumah tangganya.¹¹

Dari definisi tersebut di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dengan adanya zakat fitra, selain untuk membahagiakan hati fakir miskin pada

¹⁰ Muhammad Solikhin, *Ajaran Ma'rifat syekh Siti jenar*, (Yogyakarta: Narasi 2007), h.379.

¹¹ Sayyid sabiq, op.Cit., h.127

saat hari raya idul fitri, juga di maksudkan untuk mebersihkan dosa-dosa kecil ataupun dosa besar yang mungkin terjadi selama melaksanakan puasa di bulan ramadhan maupun di luar bulan ramadhan, agar orang itu kembali pada keadaan fitra suci seperti ketika di lahirkan. Dengan adanya zakat maal (zakat harta ataupun zakat fitra) seorang dapat melatih dirinya untuk membelanjakan harta demi kepentingan orang lain, menurut kadar yang telah di tentukannya.

2. Tujuan Zakat

Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi Islam (*Obligatory Zakat System*), sehingga pelaksanaanya melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum. Zakat dikumpulkan, dikelola, atau di distribusikan melalui lembaga baitul maal.

Ketentuan atau instrument yang ditetapkan Allah swt. pada semua aspek kehidupan manusia pada umumnya memiliki dua fungsi utama yang memberikan manfaat bagi individu (*Nafs*) dan kolektif (*Jama'i*). Demikian pula halnya pada sistem zakat dalam islam yang berfungsi sebagai alat ibadah bagi orang yang membayar zakat (*Muzakki*), yang memberikan kemanfaatan individu (*Nafs*), dan berfungsi sebagai penggerak ekonomi bagi orang-orang di lingkungan yang menjalankan sistem zakat ini, yang memberikan manfaat kolektif (*jama'i*).

Manfaat individu dari zakat adalah bahwa ia akan membersihkan dan menyucikan mereka yang membayar zakat. Zakat akan membersihkan hati manusia dari sifat kekikiran dan cinta harta yang berlebihan, dan zakat yang menyucikan atau menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia.

Sementara itu, manfaat kolektif dari zakat adalah bahwa zakat akan terus mengingatkan orang yang memiliki kecukupan harta bahwa ada hak orang lain dalam hartanya. Sifat kebaikan ini yang kemudian mengantarkan zakat memainkan perannya sebagai instrument yang memberikan kemanfaatan kolektif (*Jama'i*). Dengan kelembutan dan kebaikan hati, manusia akan memberikan hartanya kepada manusia lain yang membutuhkan. Dengan kata lain, zakat “memaksa” manusia yang memiliki kecukupan harta berinteraksi dengan manusia lain yang kekurangan.¹²

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena dia mempunyai ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan manusia. Pensyariatkan zakat dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah.

Adapun tujuan utama diwajibkannya zakat atas ummat Islam yaitu untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan ummat Islam dan negara. Dan tujuan tidak akan tercapai, apabila pelaksanaan zakat di serahkan sepenuhnya kepada kemauan para wajib zakat. Demikian pula zakat dikelola oleh badan amil zakat non pemerintah yang jumlahnya tidak terbatas tanpa pengawas, pengadilan dan pembinaan dari pemerintah tidak akan sukses.

¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.10

Demikian halnya apabila pengelolaan zakat terlalu banyak ditangani oleh badan-badan amil zakat yang tidak terhitung jumlahnya tanpa pengawasan dan pembinaan pemerintah, tidak bisa menghimpun dana tetap yang cukup besar untuk mencapai tujuan utama zakat, yakni untuk memberantas kemiskinan, meratakan pendapatan dan meningkatkan harta umat Islam dan negara, serta untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera jasmani dan rohani serta kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

C. Harta Yang Wajib di Zakatkan

Kita ketahui bahwa di dalam kitab-kitab hukum fiqih Islam harta kekayaan yang wajib di zakatkan atau di keluarkan zakatnya digolongkan kedalam kategori:

1. Emas, perak dan mata uang
 2. Harta peniagaan
 3. Binatang ternak
 4. Buah-buahan dan biji-bijian yang dapat di jadikan makanan pokok
 5. Barang tambang dan barang temuan¹³
- a. Zakat emas dan perak

Perlu di pahami bahwa dasar hukum wajib zakat bagi harta kekayaan yang berupa emas, perak dan mata uang adalah : Qs. At-Taubah/ 9 : 34 yang berbunyi :

¹³Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Thoha Putra. 1978), h.349.

وَالْيَاكُفُونَ وَالرُّهْبَانِ الْأَحْبَارِ مِنْ كَثِيرٍ إِنْءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهِمْ
 لَا وَالْفِضَّةَ الذَّهَبَ يَكْنُزُونَ وَالَّذِينَ اللَّهُ سَبِيلٌ عَنْ وَيَصُدُّونَ بِالْبَطْلِ النَّاسِ أَمْ
 أَلَيْمَ بَعَذَابٍ فَبَشِّرْهُمْ اللَّهُ سَبِيلٌ فِي يُنْفِقُونَهَا

Terjemahnya :

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.¹⁴

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah swt. mengancam orang-orang yang bakhil yang menyimpan emas dan perak di dalam peti, tanpa memanfaatkannya di jalan kebaikan. Mereka akan mendapatkan siksa yang pedih di dalam neraka. Dan Allah swt. mengatakan kepada mereka bahwa inilah balasan bagi perbuatan kalian yang telah menahan hartanya dengan tidak memberikan makan fakir miskin hanya dia yang menikmatinya sendiri, maka balasan mereka adalah hartanya itu menjadi bencana yang menimpa yang di hari kemudian.

Adapun syarat-syarat wajib zakat emas dan perak adalah :

- a) Milik orang Islam
- b) Yang memiliki adalah orang merdeka
- c) Milik penuh (dimiliki dan menjadi hak penuh)
- d) Sampai nishabnya
- e) Genap satu tahun¹⁵

1. Nishab dan zakat emas

¹⁴Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. *Cit*, h.862.

¹⁵Moh. Rifa'i, *Op, Cit.*, h.350.

Nishab emas bersih ialah 20 dinar atau kurang lebih sama dengan 96 gram emas murni, setelah dimiliki selama satu tahun wajib dikeluarkan zakatnya sebesar dua setengah persen. Jika kurang dari nishabnya walau sebenarnya sebiji gandum, tidak wajib dizakati.

2. Nishab dan zakat perak

Nishab perak bersih 20 dirham sama dengan 672 gram, zakatnya dua setengah persen apabila telah dimiliki cukup satu tahun. Apabila telah lewat satu tahun (haul) atas kepemilikannya 200 dirham (murni) perak, maka zakatnya 5 dirham, dua setengah persen. Bila setiap kelebihan walaupun satu dirham wajib dizakati dengan perbandingan seperti diatas.

3. Nishab dan zakat uang

Juga zakat diwajibkan atas pemilik uang perak yang tercantum, jika berat murninya mencapai nishab. Nishab dan zakatnya dua setengah persen atau seperempat puluh. Perlu diketahui bahwa nishab uang kertas belum ditentukan pada zaman Nabi Muhammad saw., karenanya alat tukar dan alat bayar pada waktu itu adalah barang logam seperti emas dan perak. Dengan mengingat fungsi alat tukar, alat bayar dan satuan hitung kekayaan kebanyakan diambil oleh uang kertas, sedangkan uang kertas lebih berfungsi sebagai standar. Apabila seseorang memiliki simpanan emas dan perak serta punya simpanan uang, masing-masing tidak sampai nishabnya, tapi apabila jumlahnya sampai nishab maka sebaiknya dizakatkan.

b. Zakat Perniagaan

Zakat perniagaan sama nishabnya seperti zakat emas dan perak , adapun haulnya dihitung sejak dimilikinya uang untuk kembali barang yang diperdagangkan, dengan catatan uang tersebut kurang telah mencapai nishab.¹⁶ Tetapi apabila uang tersebut kurang dari nishab atau ia membeli barang dengan meniatkannya sebagai dagangan, maka haulnya diniatkan sejak waktu kembali.

Perlu diketahui bahwa barang siapa yang memiliki barang-barang perniagaan yang banyaknya cukup satu tahun, hendaklah ia menaksir harganya pada akhir tahun itu lalu mengeluarkan zakatnya yaitu seperempat puluh dari harga tersebut.¹⁷ Demikianlah harus dilakukan oleh saudagar itu terhadap barang dagangannya setiap tahun, dan tidak dihitung satu tahun bila jumlah yang dimiliki tidak cukup satu tahun.

c. Binatang Ternak

Zakat atas hewan ternak atau yang lainnya tidak diwajibkan kecuali atas orang muslim yang merdeka (bukan budak) walaupun bukan berusia dewasa. Oleh sebab itu diwajibkan pula atas harta miliknya dizakatnya.

Adapun syarat-syarat diwajibkan zakat zakat hewan ternak, ialah:

a) Adanya ternak

Ternak yang dimiliki itu harus terdiri atas unta, sapi, domba (kambing). Tidak ada zakat ternak atas kuda, baghal, kedai dan hewan yang diperakkan antara kijang dan domba.

¹⁶ Al- Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat* (Cet. VI: Bandung: Kharisma, 1993), H. 55

¹⁷ Sayyid Sabiq, *op. Cit.*, h. 40.

b) Digembalakan di rumput lepas

Cukup haulnya, maka tidak ada zakat ternak atas hewan yang diberikan makan secara langsung. Demikian pula ternak yang ada kalannya digembalakan dan ada kalanya diberi makan, tidak ada zakat ternaknya.

c) Cukup setahun

Cukup haulnya (telah lewat satu tahun sejak dimulai usahanya itu). Perlu diketahui bahwa tidak ada kewajiban zakat atas satu harta sampai telah genap setahun. Dikecualikan dari hal ini, hasil (anak-anak) dari ternak yang lahir sepanjang tahun, maka ia diikutkan haulnya dengan asalnya (ibunya). Dan jika ternak tersebut haulnya itu terputus, tidak ada zakatnya.

d) Dimiliki secara sempurna

Maksudnya adalah ternak yang sedang dalam keadaan tergadai. Tetapi tidak wajib atas hewan yang tersesat (hilang) atau terampas kecuali setelah kembali kepada pemiliknya beserta anak-anaknya yang lahir sepanjang waktu tersebut atau terampas. Maka diwajibkan dikeluarkan zakatnya untuk masa yang lewat tersebut, apabila telah kembali.

e) Cukup nishabnya (batas minimal jumlahnya)

Nishab dan zakat unta, tidak wajib zakat atasnya kecuali jika telah mencapai lima ekor. Untuk jumlah tersebut (sampai 9 ekor) zakatnya ialah seekor domba yang usianya setahun lebih. (selanjutnya lihat table I)

Nishab dan zakat sapi (kerbau), tidak ada kewajiban zakat atasnya kecuali telah sampai 30 ekor atasnya. Untuk jumlah tersebut, zakatnya ialah seekor anak sapi (kerbau) berusia satu tahun lebih. (selanjutnya lihat table II)

Begitu pula nishab dan zakat kambing, tidak ada kewajiban zakat atasnya kecuali jika telah sampai 40 ekor untuk jumlah tersebut. (selanjutnya lihat table III)

TABEL I

Jumlah Sapi	Zakatnya	Usia
5-9	1 ekor kambing biasa atau 1 ekor kambing domba	2 taun/lebih
10-14	2 ekor kambing biasa atau 2 ekor kambing domba	
15-19	3 ekor kambing biasa atau 3 ekor kambing domba	
20-24	4 ekor kambing biasa atau 4 ekor kambing domba	
25-35	1 ekor anak unta	
35-45	1 ekor anak unta	
46-60	1 ekor anak unta	
61-75	1 ekor anak unta	
76-90	2 ekor anak unta	
91-120	2 ekor anak unta	
121	2 ekor anak unta	

TABEL II

Jumlah Sapi	Zakatnya
30-39	1 ekor anak sapi, usia 1 tahun lebih
40-59	1 ekor anak sapi, usia 2 tahun lebih
60-	1 ekor anak sapi, usia 1 tahun lebih

TABEL III

Jumlah Kambing	Zakatnya
40-120	1 ekor kambing betina biasa, usia 2 tahun lebih atau 1 ekor kambing domba betina, usia 1 tahun lebih
121-200	2 ekor kambing betina biasa, usia 2 tahun lebih atau 2 ekor kambing domba betina, usia 1 tahun lebih
200-339	3 ekor kambing betina biasa, usia 2 tahun lebih atau 3 ekor kambing domba betina, usia 1 tahun lebih

Dari ketiga binatang tersebut tidak dibenarkan menganbil zakatnya dari hewan yang sakit apabila sebagian hewan tersebut ada yang sehat, walaupun hanya seekor hendaklah tidak dari yang paling bagus atau yang paling jelek. Sebagaimana firman Allah swt. Qs. Al-Baqarah 267 yang berbunyi:

بَا خَذِيْهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُوْنَ مِنْهُ الْخَبِيْثَ تَيَمَّمُوْا وَاَوَّلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya”.¹⁸

d. Buah-Buahan dan Bijian

Hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu yang dapat dijadikan makanan pokok seperti padi, jagung, gandum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tanaman makanan pokok (yang sesuai dengan daerah masing-masing)
2. Diusahakan oleh manusia
3. genap satu nishab¹⁹

Adapun maksud dari ketiga syarat tersebut adalah makanan yang bisa mengenyangkan perut orang di daerah masing-masing. Tanaman harus diusahakan oleh manusia, maksudnya yaitu ditanam, dipelihara dengan baik, dandimilikinya,

¹⁸ Deperteme Agama, *op.Cit.*, h. 67.

¹⁹ Moh. Rifa'i, *Terjemahan Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Thoha Putra. 19787), h. 134

dan cara menanamnya bisa dengan cara menaburkan biji seperti gandum, dan padi kering. Dan genap satu nishab artinya jumlah panen keseluruhan mencapai satu nishab, cukup waktunya. Walau diwajibkannya pengeluaran zakat ialah ketika Nampak masakny buah-buahan.

kewajiban membayar zakat buah-buahan, kalau sudaah memenuhi 4(empat) syarat:

- a) Islam
- b) Merdeka
- c) Milik yang sempurna
- d) Genap satu nishab

Zakat biji-bijian wajib dikeluarkan sepersepuluh dari setiap hasil biji-bijian yang mengenyangi, adapun jenis biji-bijian seperti nintha (sejenis cantle) syair (gandum) tidak dicampur untuk menyempurnakan nishab, yaitu harus mencapai ishab untuk dkenakan zakat atasnya.

Adapun kadar zakat yang harus dikeluarkan dari tanaman dan buah-buahan tersebut dibedakan bagaimana cara pemeliharaannya, terutama pengairanya yaitu:

- a) Tanaman (buah-buahan) yang diairi dengan air hujan, air embun, air yang diairi dengan sungai dll, yangtidak membutuhkan tenaga.

Tanaman tang diairi seperti diatas, diwajibkan membayar zakat10 persen dari hasil panen (seketika).

- b) Tanaman yang diairi dengan menimbah, mengambil ataupun oleh tenaga buatang dengan air yang dibeli. Tanaman yang diairi dengan cara tersebut diwajibkan mengeluarkan zakat sebesar 5 persen.²⁰

e. Barang Temuan (Rikaz)

Rikaz ialah harta yang terpendam sejak masa jahiliyah dan ditemukan disuatu bidang tanah yang belum pernah dimiliki oleh seseorang pada masa Islam.²¹ Apabila rikaz yang ditemukan itu berupa emas atau perak, maka si penemu itu harus mengeluarkan zakatnya sebanyak seperlimanya. Hal ini diperlukan berjalannya haul, sebaliknya juga tidak mempersyaratkan terpenuhnya nishab karena ini mirip dengan rampasan perang.

Menurut pendapat Malik mengenai rikaz yaitu harta terpendam dari masa jahiliyah yang diperoleh tanpa menggunakan harta atau membutuhkan biaya, begitu pula tanah dan susah payah.²² Sedangkan Abu Hanifah berkata rikaz adalah sebutan bagi apa yang disembunyikan oleh Tuhan atau oleh makhluk.²³

Dari kedua pendapat ini penulis akan mengambil kesimpulan bahwa rikaz ini adalah harta yang sudah berabad-abad lamanya terpendam yang merupakan warisan oleh nenek moyang kita pada masa lampau.

f. Barang Tambang

²⁰Moh.Rifa'i, *op.Cit.* h. 138.

²¹ AL-Ghajali, *op.Cit.*, h. 56

²²Lihat Sayyid Sabiq.*op.Cit.*, h. 73

²³*Ibid.*h.38

Perlu diketahui bahwa hasil galian (barang tambang) perlu dizakai seperti emas dan perak, zakat ini dikeluarkan dikala mendapatkan benda itu, tanpa ada syarat waktu atau besar kecilnya barang. Adapun macam barang tambang itu dapat dibedakan atas 2 (dua) yaitu:

1. Benda padat yang dapat dibentuk (dicairkan dan diolah) seperti emas, perak, aluminium, besi, tembaga dan timah.
2. Benda cair seperti minyak bumi dan gas.²⁴

Adapun jumlah zakat dari hasil tambang menurut pendapat yang shahih ialah dua setengah persen (seperempat puluh) dari hasilnya, setelah diolah dan dibersihkan serta mencapai nishab.



²⁴K.N Sofyan Hasan.*op.Cit.*, h. 38

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian pada hakikatnya merupakan salah satu rangkaian kegiatan ilmiah baik untuk keperluan pengumpulan data, menarik kesimpulan atas gejala-gejala tertentu dalam gejala empirik.¹ Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu meneliti informan sebagai subjek penelitian-dalam lingkungan hidup kesehariannya.² atau biasa di sebut penelitian di lapangan. Menurut Iodico, Spaulding dan Voegtli penelitian kualitatif yang juga disebut sebagai penelitian interpretif adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi kedalam setting pendidikan.³ peneliti menggunakan metode wawancara kepada beberapa pimpinan-pimpinan yang menjabat di periode saat itu.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini dilakukan di kantor Baznas Kota Makassar yang terletak di jalan teduh bersinar No.5.

¹Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer*. (Cet, 10, Jakarta: Rajawali Pers, 2015).h.91.

²Muhammad Idrus. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta, Erlangga, 2009), H.23

³Prof. Dr. Emzir, M.pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*, (Cet ke-4, Jakarta, Rajawali Pers, 2014), h. 2.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Menurut harfiahnya pendekatan yuridis adalah melihat atau memandang suatu hal yang ada dari aspek atau segi hukumnya terutama peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah sesuatu yang ada dan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai akibat hukum.

Dengan demikian yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan cara pandang dari aspek hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi di masyarakat yang berakibat hukum untuk dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Metode pendekatan tersebut menurut penulis memiliki relevansi dengan Judul yang di ambil oleh peneliti lebih condong ke perilaku masyarakat dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer (utama)

Data primer yaitu data utama yang digunakan dalam sebuah penelitian. Sumber data primer yaitu bahan yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya.

Dalam hal ini data primer (utama) yang di lakukan peneliti yaitu UUD 1945, UU nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum dan hasil wawancara terhadap tokoh yang paham mengenai judul skripsi ini.

2. Data Sekunder (tambahan)

Data sekunder adalah data pelengkap dalam sebuah penelitian, misalnya buku-buku yang berkaitan mengenai judul skripsi tersebut, literature, dan skripsi-skripsi terdahulu. adapun data pelengkap yang digunakan peneliti yaitu buku yang berkaitan mengenai pemimpin, buku tentang kepemimpinan dalam Islam, buku tentang Organisasi Islam yang akan digunakan dalam skripsi ini, fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara

Wawancara menurut black dan champion dalam muslimina adalah teknik penelitian yang paling sosiologis dari semula teknik penelitian sosial.⁴ Wawancara ialah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula.⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data jenis wawancara tidak terstruktur yaitu memberi peluang kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian.⁶ Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka yaitu wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, dalam

⁴Dra.Nurul Zuriyah, M.Si. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Teori-Aplikasi*, (Cet 3; Jakarta: PT Bumi Aksra, 2009). h.179

⁵Dra.Nurul Zuriyah, M.Si. Lihat, h.179

⁶Dra.Nurul Zuriyah, M.Si. Lihat, h.180.

artian pertanyaan yang mengundang jawaban terbuka.⁷ Hal yang sama juga disampaikan oleh koentjaraningrat (1986:136) bahwa wawancara terbuka atau *open interview* adalah jawaban yang dikehendaki tidak terbatas maka wawancara tersebut merupakan bentuk wawancara terbuka.⁸ Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara yang ditujukan kepada pimpinan dari tiap-tiap organisasi masyarakat Islam yang akan di teliti.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun non partisipatif. Maksudnya, pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa melibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti .⁹ Menurut Tjan dan Alfian cara penelitian yang mengandalkan metode observasi sangat penting.¹⁰

Menurut Patton observasi ialah deskripsi kerja lapangan kegiatan, perilaku, tindakan, percakapan, interaksi, inter personal, organisasi atau proses

⁷Prof. Dr. Emzir, M.pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*, (Cet ke-4, Jakarta, Rajawali Pers, 2014), h. 51.

⁸Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer*. (cet, 10, Jakarta: Rajawali Pers, 2015).h. 100.

⁹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* , h. 101.

¹⁰Dra.Nurul Zuriah, M.Si. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Teori-Aplikasi*, (Cet 3; Jakarta: PT Bumi Aksra, 2009).h.173.

masyarakat, atau aspek lain dari pengalaman manusia yang dapat dialami.¹¹ Observasi dapat pula diartikan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti mengenai fenomena objek penelitian diikuti dengan pencatatan sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti, observasi tidak hanya terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain.

Dari segi jenisnya observasi terbagi menjadi observasi langsung yaitu observasi yang dilakukan dimana observer berada bersama objek yang di selidiki. Dan observasi tidak langsung yaitu observasi yang dilakukan tidak saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diteliti, misalnya melalui film, foto atau tayangan slide.¹² Dari segi prosesnya observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti dan berperan sebagai anggota didalam masyarakat topik penelitian, dan observasi non partisipan yaitu observasi yang menjadi peneliti sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian¹³, dan dari segi instrumentasi yang digunakan maka dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur (dirancang sistematis) yaitu observasi yang diselenggarakan dengan menentukan cara-cara sistematis, faktor-faktor yang akan diobservasi lengkap dengan kategorinya dan observasi tidak terstruktur (tidak dipersiapkan secara

¹¹Prof. Dr. Emzir, M.pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*, (Cet ke-4, Jakarta, Rajawali Pers, 2014),h. 65.

¹²Dra.Nurul Zuriah, M.Si. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Teori-Aplikasi*, (Cet 3; Jakarta: PT Bumi Aksra, 2009). h.173.

¹³Prof. Dr. Emzir, M.pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*, (Cet ke-4, Jakarta, Rajawali Pers, 2014),h. 39-40.

sistematis) yaitu observasi yang dilakukan tanpa terlebih dahulu mempersiapkan dan membatasi kerangka yang akan diamati.¹⁴

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental.¹⁵ Dokumen yang berbentuk tulisan seperti peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, video dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan dokumen adalah merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁶

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Hal senada juga diungkapkan oleh S. Margono yang menyatakan bahwa pada umumnya penelitian akan berhasil apabila banyak menggunakan instrumen, sebab data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dan menguji hipotesis diperoleh melalui instrumen.¹⁷

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

¹⁴Dra.Nurul Zuriah, M.Si. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Teori-Aplikasi*, (Cet 3; Jakarta: PT Bumi Aksra, 2009). h.176.

¹⁵Dr. Lexy J. Moleong, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Cet 13; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000). h. 60.

¹⁶Prof. Dr. Emzir, M.pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*, (Cet ke-4, Jakarta, Rajawali Pers, 2014),h. 37.

¹⁷Dra.Nurul Zuriah, M.Si. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Teori-Aplikasi*, (Cet 3; Jakarta: PT Bumi Aksra, 2009). h. 168.

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara yaitu alat yang digunakan dalam wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa pertanyaan.

2. Alat tulis dan buku catatan

berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.¹⁸

3. Alat perekam

peneliti menggunakan *tape recorder* agar lebih memudahkan peneliti dalam hal menyimak apa yang dikatakan pembicara nanti, hal ini juga dapat membuat data lebih akurat.¹⁹

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Untuk membuktikan apa yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini digunakan dua metode analisis, yaitu :

1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu analisis yang menggunakan masalah tidak dalam bentuk angka-angka, tetapi berkenaan dengan nilai yang didasarkan pada hasil pengolahan data dan penilaian penulis.

2. Analisis komparatif

Analisis komparatif yaitu metode yang dipergunakan untuk membandingkan data yang telah ada kemudian ditarik kesimpulan

¹⁸Dr. Lexy J. Moleong, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Cet 13; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000). h. 130.

¹⁹Dr. Lexy J. Moleong, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Cet 13; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000). h. 151.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketekunan, yaitu melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.²⁰ Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deksripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.

2. Menggunakan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih cepat di percaya.²¹ Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.

²⁰Dr. Lexy J. Moleong, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Cet 13; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000). h. 127.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* ,(Bandung:Alfabeta,2004). h. 306

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum lokasi penelitian

Kota Makassar hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung Pandang adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu pernah menjadi ibu kota Negara Indonesia Timur dan provinsi Sulawesi. Makassar terletak di pesisir barat daya pulau Sulawesi dan berbatasan dengan selat Makassar di sebelah barat, kabupaten kepulauan pangkajene di sebelah utara, kabupaten Makassar di sebelah timur dan kabupaten gowa di sebelah selatan. Kota Makassar berpenduduk sebanyak 1.193.497 jiwa, secara administrative Kota Makassar terdiri atas 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Kegiatan keagamaan di kota Makassar terbilang cukup tinggi hal ini dapat dilihat dari berdirinya 2 masjid besar yakni Masjid Al-Markaz al-islami dan Masjid raya kota Makassar dilihat dari seringnya ada aktivitas keagamaan dari kedua masjid ini. Dari tingginya kegiatan keagamaan masyarakat muslim di Kota Makassar secara tidak langsung mempengaruhi intensitas kegiatan muslim dalam berzakat, meskipun sebagian besar kegiatan zakat hanya berfokus kepada zakat fitrah yang dikelola tiap hari raya idul fitri. Namun, pada tahun 2003 mulai tampak adanya kesadaran untuk membayar zakat mal, hal ini ditandai dengan banyaknya lembaga

pengelola zakat yang berdiri baik yang dikelola oleh masyarakat maupun yang dikelola oleh pemerintah.¹

Pengelolaan zakat telah menjadi perhatian pemerintah daerah sejak dahulu. Yaitu semenjak adanya instruksi presiden Suharto pada masa itu mengenai pembentukan Badan Amil Zakat Infaq dan sedekah yang berperan sebagai kordinator.

B. Profil BAZNAS Kota Makassar

Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar merupakan instansi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah kabupaten /kota. Kantor Badan Amil Zakat Nasional terletak di jalan teduh bersinar No. 5 Makassar, SulSel. Pada Periode kepemimpinan tahun 2015 BAZNAS Kota Makassar dipimpin oleh bapak DR. H. Anis Zakaria Kama.

Badan Amil Zakat Nasional mulai berkantor resmi pada bulan oktober 2007. Berdasarkan Instruksi Presiden No.3 tahun 2014 yang dikeluarkan pada tanggal 23 April 2014 tentang Optimalisasi pengumpulan Zakat di Kementrian/ lembaga/ Sekjen lembaga Negara/ Sekjen komisi Negara, Pemda, BUMN, dan BUMD melalui BAZNAS. Penetapan di Kota Makassar tentang berlakunya BAZNAS berdasarkan keputusan Dirjen Bimbingan masyarakat Islam/ KEMENAG no.DD.11/ 568/ 2014.

¹https://id.Wikipedia.Org/wiki/kota_Makassar.

VISI dan MISI Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar

Visi : Menjadi Badan Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan professional.

1. Misi :

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- 3) Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, professional, dan terintegrasi.
- 4) Mewujudkan pusat data zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

Tugas Pokok dan Fungsi badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar

Badan Amil Zakat Nasional kota Makassar mempunyai tugas merencanakan, mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama di kota Makassar berdasarkan Peraturan Badan Amil zakat Kota Makassar Nomor 01 Tahun 2015. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BAZNAS Kota Makassar memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pengelolaan, pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat di kota Makassar
2. Pembinaan dan Mengembangkan perekonomian umat,terkhusus di kota makassar

3. Pencatat kegiatan potensi zakat masyarakat Kota Makassar
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat
5. Pelayanan Zakat Masyarakat Kota Makassar
6. Pengembangan dana zakat masyarakat Kota Makassar
7. Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di Bidang Administrasi zakat di Kota Makassar

C. Strategi Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar Dalam Memaksimalkan Pengelolaan Potensi Zakat.

Mengenai pengelolaan zakat, Kota Makassar memiliki potensi yang sangat besar. Saat ini Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar masih mengoptimalkan Zakat profesi dari para aparat sipil Negara di Kota Makassar. Dalam aturan agama Islam itu kan sangat jelas ketentuan berzakat bagi mereka yang mampu dan dalam aturan Undang-undang juga ada², Dalam rapat kerja disalah satu hotel di Makassar, Anis juga meminta kepada warga Makassar pada umumnya agar bisa menerapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan aturan pelaksanaanya yang dituangkan dalam RKAT tahun 2017. Namun, saat ini BAZNAS telah melakukan sosialisasi ke kantor kantor di seluruh Kota Makassar mengenai anjuran Wali Kota Makassar yang menganjurkan pembayaran zakat profesi di

² Anis Zakaria, Ketua Badan Amil Zakat Kota Makassar

BAZNAS Kota Makassar. Untuk memaksimalkan potensi zakat profesi di Kota Makassar yang mencapai 5 Milyar Rupiah pertahunnya.³

Untuk memudahkan pelayanan zakat kepada masyarakat maka dibentuklah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), yaitu suatu organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk semua tingkatan dengan tugas melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya. Pembentukan UPZ ini dilakukan pada instansi pemerintah maupun instansi swasta. Pada BAZNAS pembentukan UPZ ini dilakukan disetiap desa maupun kelurahan. Tujuan pembentukan UPZ ini adalah untuk melakukan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah di unit masing-masing dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh BAZNAS dan memberikan hasilnya kepada bagian pengumpulan pelaksana BAZNAS.

Dalam Mengelola Zakat yang masuk ke BAZNAS ini mereka membentuk beberapa program, berikut beberapa Program tersebut:

1. Program produktif

- a. Makassar Taqwa
- b. Makassar Sejahter
- c. Makassar Sehat
- d. Makassar Peduli

³Mujetaba Mustafa, Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar

Adapun bantuan zakat infak dan sedekah (Zis) juga di salurkan untuk guru mengaji di Kota Makassar. Dengan jumlah 350 guru mengaji.

a. Efektifitas pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar

Mengenai pengelolaan zakat tentunya tidak dapat dipisahkan dari sebuah ukuran akan berhasil atau tidaknya pengelolaan zakat tersebut, keberhasilan dalam pengelolaan zakat di tentukan dari strategi dan manfaat zakat bagi *mustahiq*. Menurut Dr. H. Anis Zakaria Kama keberhasilan pengelolaan zakat dapat dilihat dari adanya perubahan pada diri seseorang dari yang awalnya menjadi *mustahiq* beralih menjadi seorang muzakki.

Untuk mengubah peran seorang *mustahiq* dari yang dibantu menjadi muzakki yang membantu, dalam zakat ditentukan oleh strategi dan program pendistribusian yang dilakukan oleh amil zakat. Kreatifitas amil zakat dalam menyalurkan menjadi suatu hal yang penting karena keberhasilan ini hanya dapat dicapai dengan pola pendistribusian zakat secara produktif. Dimana dalam pendistribusian zakat secara produktif sangat diperlukan untuk membangun kekuatan ekonomi *mustahiq* menjadi lebih mandiri dan berdayaguna.

Menurut pasal 27 Undang- undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pendayagunaan zakat dapat dilakukan kala kebutuhan dasar seorang *mustahiq* telah terpenuhi.

Hal ini menandakan bahwa sejak disahkannya undang-undang ini, amil zakat dituntut untuk bekerja lebih keras baik untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar mustahiq dan memberdayakan perekonomiannya menjadi lebih produktif.

BAZNAS Kota Makassar untuk memenuhi tuntutan dari undang undang nomor 23 tahun 2011 ini telah memiliki beberapa program pendayagunaan untuk memberdayakan perekonomian mustahiq. Program pemberdayaan ini diharapkan untuk membantu masyarakat dapat memiliki usaha mandiri untuk digunakan memenuhi kebutuhannya.

BAZNAS Kota Makassar sendiri telah mengklaim beberapa keberhasilan program pemberdayaan zakatnya. Melalui program produktif Makassar sejahtera BAZNAS Kota Makassar telah memberdayakan beberapa perekonomian masyarakat menjadi lebih produktif bahkan beberapa masyarakat tersebut saat ini telah berubah peran menjadi salah seorang muzakki yang rutin membayarkan zakatnya di BAZNAS Kota Makassar.

b. Strategi BAZNAS Kota Makassar dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat di Kota Makassar.

Mengenai strategi pengelolaan zakat, berhasil atau tidaknya sangat tergantung pada amil zakat yang mengelolah zakat tersebut. Untuk menghadapi kesulitan dalam pengelolaan zakat, BAZNAS Kota Makassar memiliki strategi yang dibagi menjadi tiga bagian yakni strategi publikasi zakat, strategi aksi, dalam pengelolaan zakat, dan strategi dalam bidang administrasi pegelolaan zakat.

Strategi dalam publikasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi UU No 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Pada tahun 2014, kurang lebih 10 kali BAZNAS Kota Makassar telah melakukan/melaksanakan sosialisasi ke masyarakat, kemudian di tahun 2015 BAZNAS Kota Makassar kembali melakukan sosialisasi ke masyarakat kurang lebih 10 kali pula. Seperti di tahun 2014 dan di tahun 2015, sosialisasi kembali dilakukan pada tahun 2016 oleh BAZNAS Kota Makassar, kurang lebih 18 kali sosialisasi kepada para tokoh masyarakat dan pada para aparat sipil negara di tiap masjid-mesjid. Ada beberapa bentuk sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kota Makassar yakni sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka, kemudian sosialisasi melalui media, dan sosialisasi melalui spanduk.

2. Penyuluhan kepada masyarakat

Penyuluhan pada tahun 2014 dilakukan sebanyak 10 kali dan di tahun 2015 hampir sama di tahun 2014, kurang lebih 10 kali telah melakukan penyuluhan, di tahun 2016 penyuluhan yang dilakukan BAZNAS Kota Makassar agak meningkat dibanding tahun sebelumnya, Penyuluhan ini di rangkaiakan pada saat melakukan sosialisasi.

Bentuk Penyuluhan dalam berzakat dilakukan oleh BAZNAS kepada masyarakat umum melalui khotbah jumat.

3. Memberikan Laporan Kegiatan/aktivitas keuangan BAZNAS secara terbuka pada tahun 2014,2015 dan 2016

Dari beberapa strategi publikasi zakat oleh BAZNAS Kota Makassar ini dapat disimpulkan bahwa strategi mereka dalam hal publikasi zakat sudah bagus. Apalagi dengan adanya rencana penerbitan NPWZ tersebut sehingga mau tidak mau para pegawai yang ada di Kota Makassar ini harus membayarkan zakatnya di BAZNAS.

Sedangkan dalam strategi administrasi pengelolaan zakat BAZNAS Kota Makassar melakukan hal sebagai berikut:

1. Strategi Pendapatan Zakat

Berdasarkan anjuran dari wali kota Makassar setiap Aparat Sipil Negara yang berpenghasilan perbulan sebesar Rp. 2.681.000.- berkewajiban mengeluarkan zakatnya sedangkan yang berpenghasilan dibawahnya ditekankan untuk berinfaq sebesar Rp.10.000.-

2. Pembayaran Zakat Melalui Bank

Melalui program penghimpunan zakat BAZNAS Kota Makassar memiliki kerjasama dengan Bank agar para wajib zakat dapat memberikan dana zakat, infaq, dan sedekah melalui fasilitas perbangkan. Hal ini dapat dilaksanakan baik

melalui transfer, pindah buku, auto debet, ATM, Phone banking ataupun fasilitas lain yang disiapkan bank. Di tahun 2014,2015 sampai pada tahun 2016, sebagian besar para wajib zakat membayarkan zakatnya tidak melalui bank, tetapi langsung menyeter langsung ke kantor BAZNAS Kota Makassar, barulah pada tahun 2017 para wajib zakat sebagian mulai membayarkan zakatnya melalui bank. Adapun pihak bank yang bekerja sama dengan BAZNAS Kota Makassar:

- a. Bank Sulselbar, No.Rekening 20 300 12520 BAZNAS Kota Makassar
- b. BNI syariah, No.Rekening 80100000 5393 901 BAZNAS Kota Makassar
- c. Bank Permata Syariah, No. Rekening 85 10228155 BAZNAS Kota Makassar.
- d. Bank Mandiri, 152 00051 8995 2 BAZNAS Kota Makassar.

Merupakan layanan dari BAZNAS Kota Makassar kepada wajib zakat dengan menjemput secara langsung kerumah wajib zakat program ini biasa dilakukan oleh petugas zakat dengan menghubungi (0411) 8215672

Dari semua strategi administrasi pengelolaan zakat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal strategi mereka memang sudah cukup bagus namun pada kenyataannya dalam hal strategi pendapatan zakat masih kurang ASN yang berpenghasilan perbulan sebesar Rp. 2.681.000.- berkewajiban mengeluarkan zakatnya, hanya sebagian kecil dari mereka yang membayarkan zakatnya di BAZNAS, mereka hanya lebih banyak membayarkan infak saja.

Sedangkan pada strategi aksi dari pengelolaan zakat, BAZNAS Kota Makassar juga memiliki program yakni:

- Pelatihan kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Dari tahun 2014 sampai 2015 pelatihan kepada Unit Pengumpul Zakat belum di laksanakan, barulah pada tahun 2016 Pelatihan Kepada Unit Pengumpul Zakat mulai terealisasi, di laksanakan sebanyak dua kali.⁴ Pelatihan ini merupakan Program yang diberikan BAZNAS Kota Makassar kepada para Unit Pengumpul Zakat sekota Makassar tiap tahun sekali untuk meningkatkan kualitas Unit pengumpul Zakat di Kota Makassar dan biasanya berlansung pada akhir tahun. Dari strategi aksi pengelolaan zakat, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam hal ini strategi BAZNAS sudah cukup bagus dan juga pengelolaannya telah sesuai dengan undang-undang hanya saja pada strategi pelatihan kepada para Unit pengumpul zakat mungkin pelatihannya perlu ditingkatkan menjadi dua kali dalam setahun agar lebih efektif.

⁴ Katjong Tahir, S.H. (Bendahara BAZNAS Kota Makassar)

D. Efektifitas pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Makassar

Pendistribusian zakat merupakan kegiatan penyaluran zakat yang telah terkumpul pada golongan yang berhak menerima. Pendistribusian zakat tercantum dalam undang-undang RI No. 38 pasal 16 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Dalam pendistribusian zakat, Baznas Kota Makassar membuat program yakni, Makassar Taqwa, Makassar Sejahterah, Makassar Cerdas, Makassar Sehat dan Makassar Peduli. Ke 5 program tersebut memiliki segmentasi masing-masing dengan tujuan membantu masyarakat fakir dan miskin. Seperti program masyarakat sehat segmentasi zakatnya disalurkan ke kesehatan, Makassar taqwa segmentasi zakatnya disalurkan di tempat ibadah (masjid), Makassar sejahterah segmentasi zakatnya disalurkan ke masyarakat yang ingin ber usaha maka akan di beri modal usaha, Makassar peduli segmentasi zakatnya disalurkan ke masyarakat miskin yang betul-betul membutuhkan, begitupun Makassar cerdas. Salah satu programnya dengan memberikan beasiswa. Adapun zakat infaq dan sedekah (Zis) juga disalurkan kepada setiap guru mengaji di Kota Makassar dengan jumlah yang telah di tentukan. Selain itu Baznas juga membentuk bantuan khusus program pelatihan Da'i, yakni untuk membantu anak-anak muda yang ingin memperdalam atau mengembangkan ilmu keagamaannya.

Untuk melihat efektifitas zakat maka hal sangat pokok adalah dengan melihat bagaimana strategi pengelolaan zakat dapat berpengaruh dalam tiga faktor penting;

1. Potensi zakat yang dimiliki oleh masyarakat.

Pengurus BAZNAS Kota Makassar di harapkan mampu memaksimalkan zakat.sebab bila dikelola dengan maksimal, potensi zakat di Makassar bisa mencapai hasil yang maksimal setiap tahunnya.

Hal tersebut dikatakan Wali Kota Makassar bersilaturahmi dengan pengurus BAZNAS Kota Makassar. Potensi zakat di Makassar cukup tinggi namun belum dikelola dengan maksimal. Bila potensi itu di makasimalkan maka bisa menggerakkan perekonomian masyarakat miskin di Makassar. Karena itu BAZNAS menggandeng perusahaan di Makassar untuk menyalurkan zakat profesi mereka yang selanjutnya akan diberikan pada warga Makassar.

2. Jumlah potensi dana zakat yang terserap oleh BAZNAS Kota Makassar.

Saat ini BAZNAS Kota Makassar telah mengumpulkan zakat sebanyak kurang lebih 6,7 M rupiah, ini sebenarnya masih kurang jika melihat potensi zakat di kota Makassar ini.

3. Keberhasilan dari distribusi dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat.

a. Pembinaan dana produktif

BAZNAS Kota Makassar telah secara rutin melakukan pembinaan pada para penerima dana produktif yang diberikan kepada masyarakat sebagai pinjaman modal usaha tanpa bunga. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut BAZNAS dalam pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat zakat dalam pemberian modal usaha mikro maka perlu adanya pembinaan maupun pendidikan dalam pengelolaan harta, kewirausahaan dan pengembangan usahanya.

Maksud dan tujuan dilaksanakan Pembinaan Masyarakat. Bantuan Modal Usaha Ekonomi produktif ini dapat mengelola harta dan usahanya dengan baik sesuai ajaran islam, kedua meningkatnya pengetahuan kewirausahaan dan pengembangannya, ketiga mampu menerapkan keterampilan-keterampilan kewirausahaan mereka ,keempat mampu beradaptasi, berinovasi, memiliki jiwa usaha dalam menghadapi persaingan pasar usaha.

Untuk menganalisa Efektifitas kinerja BAZNAS Kota Makassar hal yang perlu dilihat berikutnya adalah pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yakni:

- a. Pasal 25 yang menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam

- b. Pasal 26 pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dengan pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memerhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.
- c. Pasal 27 ayat:1,2,dan 3
 - a). Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan perbikan kualitas ummat.
 - b). Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi
 - c). ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri.

Untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan diatas BAZNAS Kota Makassar mendistribusikan zakat kepada delapan golongan sebagaimana yang diatur dalam A-Qur'an. Sementara itu dalam pendayagunaannya Badan Amil Zakat Kota Makassar memiliki beberapa program pendayagunaan zakat sebagaimana telah diatur dalam halaman sebelumnya.

Melihat strategi pengelolaan zakat BAZNAS Kota Makassar, dapat di ukur bahwa efektifitas pendistribusian zakat di badan amil zakat nasional Kota Makassar sejauh ini sudah bagus dan cukup membantu di masyarakat khusus bagi warga yang kurang mampu (*Miskin*), namun masi perlu dilakukan kritik dan pembaharuan.

Agar strategi pengelolaan zakat dapat lebih meningkatkan kualitas dalam pengelolaan zakat itu sendiri. Melihat hal ini maka strategi yang perlu dilakukan oleh BAZNAS dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat antara lain:

- a. Semestinya anjuran bapak Wali Kota Makassar mengenai mewajibkan para Aparat Sipil Negara maupun para pekerja swasta di Kota Makassar untuk membayarkan zakat profesi mereka di BAZNAS, bukan hanya sebagai anjuran belaka, namun dibuatkan sebuah peraturan daerah yang secara khusus mengatur adanya sanksi bagi wajib zakat yang tidak membayarkan zakatnya. Hal ini diperlukan agar dalam melaksanakan pengelolaan zakat BAZNAS memiliki regulasi hukum yang lebih tinggi dan kuat untuk memaksimalkan pengelolaan zakat yang ada di Kota Makassar.
- b. BAZNAS Kota Makassar perlu bekerja sama dengan ritel-ritel minimarket berskala nasional seperti indomaret, alfamart, dan juga minimarket di setiap wilayah kota Makassar agar para pelanggan mini market tersebut dapat menginfakkan sisa uangnya di BAZNAS.
- c. Dalam hal pelatihan pengelolaan zakat kepada UPZ (Unit Pengumpul Zakat) semestinya tidak hanya dilakukan selama 1 (satu) tahun sekali. Semestinya Pelatihan kepada para Unit Pengumpul Zakat dilakukan lebih sering lagi agar pengelolaan zakat di tingkat bawah hasilnya dapat maksimal.

- d. Semestinya BAZANAS Memiliki akun resmi yang memuat laporan keuangan BAZNAS secara lengkap untuk melihat efektifitas dan kinerja BAZNAS Kota Makassar sehingga pengelolaan zakat dapat dikatakan akuntabel dan professional.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Untuk mencapai efektifitas pengelolaan zakat BAZNAS Kota Makassar menggunakan tiga strategi untuk memaksimalkan pengelolaan potensi zakat. Strategi Pertama yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar yakni dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan kewajiban membayar zakat khususnya kepada para aparat sipil Negara karena dalam hal ini BAZNAS Kota Makassar masih memaksimalkan zakat profesi. Strategi kedua dalam bidang aksi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Makassar yakni program pendayagunaan zakat dengan memberdayakan perekonomian mustahik secara produktif dengan bantuan usaha. Strategi ketiga adalah dalam bidang administrasi dimana BAZNAS Kota Makassar melalui anjuran wali Kota Makassar mengingatkan bahwa mulai dari pegawai yang berpendapatan Rp. 1.000.000,- Rupiah wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari pendapatannya tersebut

2. Dalam Mengelola Zakat yang masuk ke BAZNAS ini mereka membentuk beberapa program Produktif seperti , Makassar Taqwa, Makassar Sejahtera, Bantuan Kepengurusan Jenazah, Bantuan Khusus Program Pelatihan Da'i, Bantuan Biaya Berobat Masyarakat Miskin, Bantuan Infaq untuk Guru Mengaji, Bantuan Bencana Alam Masyarakat Tidak Mampu, Santunan Peduli Dhuafa, Bantuan Sarana Keagamaan, Bantuan untuk Sekolah-sekolah yang ada di Kota Makassar. dan strategi dalam pengelolaan zakat. Melihat strategi pengelolaan zakat BAZNAS Kota Makassar, dapat di ukur bahwa efektifitas pendistribusian zakat di badan amil zakat nasional Kota Makassar sejauh ini sudah bagus dan cukup membantu di masyarakat khusus bagi warga yang kurang mampu (*Miskin*), namun masi perlu dilakukan kritik dan pembaharuan. Agar strategi pengelolaan zakat dapat lebih meningkatkan kualitas dalam pengelolaan zakat itu sendiri. Hal ini terlihat dari laporan auditor independen dari tahun 2014 hingga tahun 2016, Jika dilihat dari peningkatan tiap tahunnya, masih banyak *muzakki* khususnya para Aparat Sipil Negara Kota Makassar yang belum melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan zakat. Hal ini menandakan stategi BAZNAS di Kota Makassar dalam bidang administrasi zakat yang dilaksanakan berdasarkan anjuran wali Kota Makassar sudah bagus, namun kurang optimal karena hanya berupa anjuran saja dan tidak memiliki sanksi yang tegas.

B. IMPLIKASI

1. Bagi BAZNAS Kota Makassar sebaiknya memiliki akun resmi bukan hanya akun social media saja namun akun resmi yang khusus menampilkan keterbukaan BAZNAS yang bisa di akses oleh masyarakat.
2. Bagi pemerintah Kota Makassar sebaiknya anjuran untuk membayarkan zakat di BAZNAS bukan hanya sekedar anjuran saja tetapi perlu dibuatkan peraturan secara khusus agar masyarakat sadar untuk membayarkan zakatnya di BAZNAS
3. Masyarakat agar mempunyai kesadaran untuk mengeluarkan zakat kepada BAZNAS atas penghasilan yang diperoleh dari semua bentuk profesi atau pekerjaan. Sehingga dengan adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat diharapkan harta yang terkumpul dari zakat bisa meningkat

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Abdullah Nasir Ulwa, *Hukum Zakat dari Pandangan Empat Mazhab*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin Jakarta: Citra antar Nusa, 1985, h. 10

Mannan Abdul, Moh. *Islamic Economic Theori and Practice*, Diterjemahkan oleh M. Nastangin dengan Judul *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek* Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1993

Al- Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, Cet. VI: Bandung: Kharisma, 1993.

Ali, Mohammad , *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Edisi I, cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer*. Cet, 10, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*, Cet ke-4, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta, Erlangga, 2009.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet 13; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Muhammad Daud Ali, *Sistim Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* cet. IX; Jakarta: UI Press, 1998.

Qardawi, M. yusuf, *Hukum Zakat, Study Komparatif Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, Di Terjemahan Oleh Salman Harun, Jakarta : Litera Antar Nusa. dengan Mengutip Mu'jam Wasit dikutip oleh K.N Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, cet I ; Surabaya : Al-Ikhlas, 1995.

Qardhawi, Yusuf, *Musyikilah Al-Faqrwakaifa al-Ajaha al-Islam*, Diterjemahkan oleh syafril Halim dengan Judul *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* Cet.I; Jakarta : Gema Insani Press, 1995.

Rifa'i, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: CV. Thoha Putra. 1978.

Sohrah, *Zakat dan Kebijakan Fiskal Meretas Akar-Akar Kemiskinan*, h. 106-107

Solikin, Muhammad, *Ajaran Ma'rifat syekh Siti jenar*, Yogyakarta: Narasi 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* ,Bandung:Alfabeta, 2004.

Zainuddin, *Hukum Zakat Perspektif Normatif, Kesejahteraan dan Keadilan Sosial* Zakiyah Daradjal, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa* Cet. II, Jakarta. Yayasan Pendidikan Islam Ruhama, 1992, h. 7.

Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Teori-Aplikasi*, Cet 3; Jakarta: PT Bumi Aksra, 2009.

<http://KBBI.go.id/> diakses pada tanggal 02 Agustus 2017 pukul 20.30

<http://pusat.baznas.go.id/> diakses pada tanggal 12 Oktober 2017 pukul 19.17

www.kompasiana.com/ diakses pada tanggal 18 Nonember 2017 pukul 9.55



LAMPIRAN



Wawancara dengan bapak Kabag. Administrasi, SDM&Umum di kantor Baznas Kota Makassar pada tanggal 18 oktober 2017



LAMPIRAN

Bapak ketua Baznas dalam program pengobatan gratis yang di selenggarakan oleh Baznas di daerah maccini sumbala kec.Tamalatea



LAMPIRAN

Bapak ketua Baznas dalam program pengobatan gratis yang di selenggarakan oleh Baznas di daerah marbo kec.Tallo



PERSETUJUAN PEMBIMBING/ PENGUJI

Skripsi yang berjudul, "Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi Kasus 2014-2016)". Yang disusun oleh Ahmad Nur Syamsir, NIM: 10100113073, Mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang seminar hasil yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 24 November 2017 M, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1439 H, dinyatakan telah diperiksa secara seksama, diteliti, dan disetujui untuk di Munaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk di proses lebih lanjut.

Makassar, 27 November 2017 M
08 Rabiul Awal 1439 H

Penguji I

: Dr. Sabri AR, M.Ag

Penguji II

: Dr. Hadi Dg. Mapuna, M.Ag

Pembimbing I

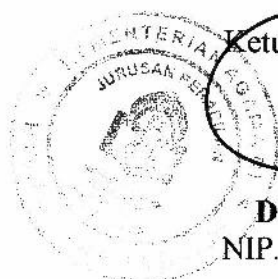
: Dr. Rahma Amir, M.Ag

Pembimbing II

: Drs. Syamsuddin Ranja, M.H.I

Disetujui oleh:

Ketua Jurusan Peradilan/Prodi



Dr. H. Supardin, M.H.I.

NIP. 19650302 199403 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang berjudul, "Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat dalam mengentaskan kemiskinan Di Kota Makassar (Studi Kasus tahun 2014-2017)," yang disusun oleh Ahmad Nur Syamsir, NIM: 10100113073, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diteliti dan dikoreksi secara saksama serta disetujui untuk diseminarkan (seminar proposal).

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 01 Agustus 2017 M
9 Zulkaidah 1438 H

Pembimbing I



Dr. Rahma Amir, M. Ag
NIP. 19670827 200112 2 001

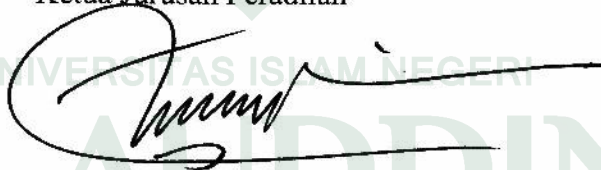
Pembimbing II



Drs. Syamsuddin Ranja, M.H.I.
NIP.19560131 198701 1 001

Disetujui oleh:

Ketua Jurusan Peradilan



Dr. H. Supardin, M.H.I.
NIP. 196503021994031003



1 2 0 1 7 1 9 1 4 2 1 3 7 7 5

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 13607/S.01P/P2T/09/2017
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Badan Amil Zakat Kota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : 3611.SI/PP.00.9/IX/2017 tanggal 12 September 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **AHMAD NUR SYAMSIR**
Nomor Pokok : 10100113073
Program Studi : Peradilan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASS 2014-2017) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **14 September s/d 14 Oktober 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 12 September 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867

Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 15 September 2017

K e p a d a

Nomor : 070 / A386 -II/BKBP/IX/2017
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. KEPALA BADAN AMIL ZAKAT
KOTA MAKASSAR

Di -
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 13607/S.01P/P2T/09/2017, Tanggal 12 September 2017, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa:

NAMA : AHMAD NUR SYAMSIR
NIM/ Jurusan : 10100113073 / Peradilan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UIN
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa
Judul : "OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN KOTA MAKASSAR (STUDI KASS 2014-20170"

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **15 September s/d 14 Oktober 2017**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini** dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A. H. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
Uu. KABID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Drs. IRIANSJAH R. PAWELLERI, M.A.P

Pangkat : Pembina

NIP : 19621110 198603 1 042

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar;

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/BAZNAS-MKS/XI/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini

Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, dengan ini menyatakan dengan
sebenar-benarnya bahwa:

Nama	: Ahmad Nur Syamsir
Nomor Pokok	: 10100113073
Jurusan	: Peradilan Agama
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Tempat/Tgl Lahir	: Makassar, 04 Oktober 1994
Program Studi	: Strata Satu (S1).
Alamat	: Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata - Gowa

Yang bersangkutan dinyatakan telah selesai melakukan kegiatan studi penelitian yang
berdasarkan referensi terkait penyusunan skripsinya yang berjudul:

***“OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM MENGENTASKAN
KEMISKINAN KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS 2014-2017”.***

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan seperlunya bagi yang bersangkutan.

Makassar, 22 November 2017

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MAKASSAR
WAKIL KETUA IV,




M. ALAMSYACH, SE., MS.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Ahmad Nur Syamsir adalah nama penulis skripsi ini, NIM : 100113073. Penulis lahir dari orang tua ADB. RAHIM dan NURPIAH sebagai anak pertama dari empat bersaudara. Penulis dilahirkan di Kota Makassar pada tanggal 04 Oktober 1994. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SD INPRES BANGKALA I ANTANG (*lulus tahun 2007*), melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 19 MAKASSAR (*lulus tahun 2010*), dan dilanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan di SMK PERSADA MAKASSAR (*lulus tahun 2013*). Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauudin (UIN) Makassar dan lulus di Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Peradilan Agama hingga tahun 2017.

Selama menyandang status Mahasiswa di jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum, penulis pernah menjadi Pengurus di HMJ Peradilan Agama periode 2015-2016. Penulis juga aktif di dunia pergerakan. Penulis terlibat secara di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum Cabang Makassar sekaligus pengurus di periode 2016-2017.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi kasus tahun 2014-2016”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R